

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Digitalisasi telah berkembang secara cepat di Indonesia dan mempengaruhi segala aspek, tidak terkecuali dalam bidang pemerintahan. Perkembangan digitalisasi secara cepat ini membuat pemerintah harus beradaptasi dengan cepat, baik dari tingkat pusat sampai daerah. Salah satu tuntutan pada era digital seperti ini adalah cepat dan tepatnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah.

Menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi tersebut, pada tahun 2003 dengan adanya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E –government* yang menandai bahwa pemerintah perlahan mulai menerapkan *e – government*. Menurut *worldbank* (2021) *e – Government* sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memiliki kemampuan untuk memudahkan hubungan antara masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah. Implementasi *E-Government* juga perlu melihat kesiapan infrastruktur jaringan internet dan komunikasi yang ada pada suatu daerah.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang pengembangan *E – Government* membuat Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta merespon dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 tahun 2006 tentang petunjuk teknis pemanfaatan jaringan komputer dalam lingkup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara singkat berdasarkan legalitas

tersebut, dapat dikatakan bahwa di Yogyakarta sendiri *E – Government* dilaksanakan sejak 2006. Sejak tahun 2006 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten mengembangkan dan melakukan implementasi *E-Government* secara bertahap.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah cukup lama dalam menerapkan *E – Government*. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aplikasi dan situs website yang dimiliki oleh Pemda DIY. Terlepas dari implementasi tersebut, perlu dilihat juga tentang infrastruktur komunikasi yang ada pada Provinsi DIY, Sebagai berikut :



(Gambar 1. 1 sumber: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku> (2021))

Berdasarkan data diatas, jumlah titik yang terkoneksi oleh jaringan Pemda DIY semakin meluas setiap tahunnya dan pada tahun 2021 ini sudah mencapai pada 260 titik. Berbeda jauh dengan tahun 2017 yang hanya 123 titik saja. Dengan rincian data infrastruktur Pemda DIY sebagai berikut :

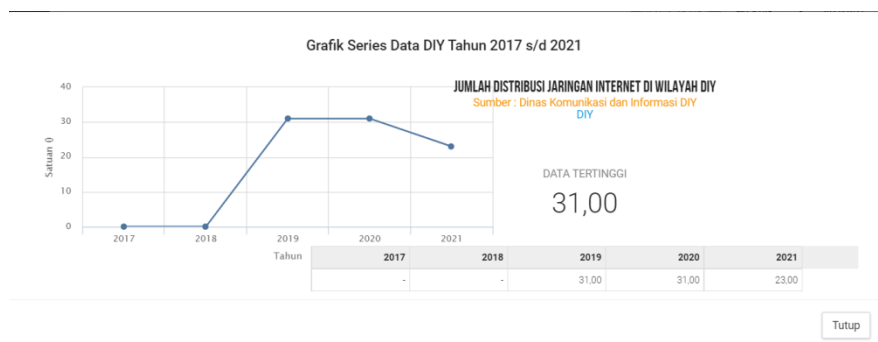
No	Elemen	Tahun					Satuan	Sifat Data	Sumber Data	Grafik
		2017	2018	2019	2020	2021				
1	Jaringan Fiber Optic (FO)	81,00	85,00	65,00	165,00	172,00	Titik Lokasi	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informasi DIY	
2	Jaringan Wireless	39,00	45,00	93,00	90,00	87,00	Titik Lokasi	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informasi DIY	
3	Jaringan Virtual Private Network (VPN)	128,00	118,00	114,00	2,00	1,00	Titik Lokasi	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informasi DIY	
4	CCTV	-	-	30,00	30,00	30,00	Titik Lokasi	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informasi DIY	

(Gambar 1. 2 sumber: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku> (2021))

Berdasarkan gambar diatas, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa jenis inrastruktur telekomunikasi seperti, jaringan fiber optik sejumlah 172 titik, jaringan *wireless* sejumlah 87 titik, jaringan *Virtual Private Network (VPN)* 1 titik *Closed Circuit Television CCTV* sejumlah 38 titik. Beberapa infrastruktur milik pemda tersebut tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahun, meskipun beberapa ada yang berkurang. Berdasrkan data diatas, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memang sudah cukup baik secara infrastruktur untuk implementasi E –Government.

Selain melihat dari infrastruktur Pemda DIY, inrastruktur pendukung untuk masyarakat juga perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur tersebut adalah tersedianya

jaringan internet yang dimiliki masyarakat.



(Gambar 1. 3 sumber: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku> (2021))

Berdasarkan jumlah provider jaringan internet yang ada di DIY, dapat dilihat bahwa ada 23 provider yang menyediakan internet untuk masyarakat DIY dengan jumlah provider tertinggi 31 provider pada tahun 2020. Dengan banyaknya jumlah provider tersebut hal ini membuktikan bahwa pengguna internet di DIY cukup banyak. Dengan begitu maka E –Government dapat secara bertahap di implementasikan dan dikembangkan di Provinsi DIY.

Dengan adanya implementasi E- Government , maka keterbukaan informasi publik menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemerintah khususnya Pemda DIY. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan undang – undang keterbukaan informasi No. 14 tahun 2008. Undang – undang tersebut menjadi landasan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatur keterbukaan informasi publik. Undang – undang tersebut menjadi acuan lembaga negara maupun pemerintah daerah dalam mengatur seluk beluk keterbukaan informasi publik.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diatur dalam PERDA DIY NO. 3 tahun 2019 dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan keterbukaan informasi yang baru saja disahkan pada tahun ini. Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2021 tentang keterbukaan informasi publik menambah kuat keharusan pemerintah dalam penyediaan informasi publik. Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur secara rinci tentang pengelolaan penyediaan informasi publik. ini juga

sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah DIY dalam keterbukaan informasi publik.

Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2021 tentang keterbukaan informasi publik tentu saja menambah kepastian hukum yang ada. Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) tersebut membuat Organisasi Perangkat Daerah harus mengikuti peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik. Lahirnya Peraturan Daerah (perda) Keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat badan publik daerah (Pemerintah Daerah) memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan informasi di badan publik. Peraturan Daerah tersebut membagi tugas dan wewenang Pejabat pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) menjadi dua bagian, yakni PPID utama dan PPID pembantu. Perbedaan ke duanya adalah terletak pada wewenang menangani ketatausahaan yang ada.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyediakan informasi pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda DIY). Secara singkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda DIY) sendiri merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam pembangunan daerah.



(Gambar 1. 4 sumber: <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku> (2021))

Berdasarkan gambar diatas kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bappeda DIY cukup baik dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain mempunyai tugas pokok sebagai badan perencanaan daerah, Bappeda DIY juga memiliki tugas untuk menyebarkan informasi publik melalui PPID pembantu Bappeda DIY. Bappeda DIY juga cukup inovatif dalam mengelola informasi publik dengan meluncurkan beberapa aplikasi.

Hasil monitoring dan evaluasi dari PPID Bappeda DIY tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah pengunjung dan permohonan informasi melalui Bappeda DIY mencapai 555.321 pengunjung. Sedangkan permohonan informasi publik yang datang langsung hanya terdapat 106 pengunjung saja. Hal tersebut membuktikan bahwa pola masyarakat dalam melihat informasi publik melalui bergeser pada sistem daring. pengunjung secara daring yang cukup tinggi maka, PPID pembantu Bappeda DIY dituntut untuk bisa terus beradaptasi dalam pelayanan informasi publik. Bappeda DIY sendiri dapat dibidang cukup adaptif dengan meluncurkan beberapa aplikasi dengan pembagian layanan informasi yang cukup spesifik, antara lain : *JogjaPlan (perencanaan)*, *Sungguh (pengendalian)*, *Dataku (aplikasi data)* dan *geoportal (peta geospasial)*.

Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan DIY melakukan inovasi dengan mengeluarkan inovasi terhadap aplikasi satu data pembangunan. Aplikasi ini secara resmi diberi nama *Dataku* pada tahun 2014. Sudah lebih dari 5 tahun semenjak aplikasi ini digunakan oleh Organisasi Perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat umum untuk berbagai keperluan. Aplikasi satu data pembangunan yang dikembangkan oleh Bappeda ini menjadi menarik karena sudah dikembangkan dan digunakan cukup lama.

Dataku DIY merupakan salah satu aplikasi yang banyak menampilkan data – data pembangunan maupun info grafis dari beberapa OPD yang ada di DIY. *Dataku DIY* sendiri merupakan aplikasi yang berbasis internet dan dapat diakses oleh Publik. *Dataku DIY* sendiri dapat disebut sebagai wujud satu data pembangunan, hal ini dapat memudahkan masyarakat maupun pemerintah kabupaten kota dalam akses informasi. Dalam pengelolaan aplikasi ini Bappeda DIY juga berkerjasama dengan pemda DIY, kabupaten kota, dan lembaga vertical yang ada di DIY. Dengan hadirnya aplikasi ini PPID pembantu Bappeda DIY dapat memberikan informasi dari hasil pembangunan ke beberapa pihak sekaligus yakni, Pemerintah ke pemerintah (G to G), Pemerintah ke Pebisnis (G to B), Pemerintah ke Akademisi (G to A), dan pemerintah ke masyarakat (G to C).

Mewujudkan sistem keterbukaan informasi publik yang semakin baik, maka diperlukan proses transformasi manajemen pemerintahan untuk menghadapi tuntutan serta konsekuensi dari perkembangan teknologi digital. Maka penelitian ini akan membahas tentang proses transformasi pemerintah provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam keterbukaan informasi publik pada era digital,
dengan berfokus pada pengelolaan aplikasi Dataku DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu : **Bagaimana Proses Transformasi Pemerintah Provinsi Yogyakarta dalam pengoptimalan keterbukaan informasi publik dalam era digital dengan adanya aplikasi Dataku**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui bagaimana proses transformasi manajemen dalam mengelola informasi publik pada era digital di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Mengetahui dan menjelaskan tata cara kerja manajemen Aplikasi DatakuDIY dalam mengelola informasi publik.
 - a. Manfaat Penelitian
 - a. Teoritis
 - penelitian ini secara teori diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi dalam penambahan wawasan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik pada era digital
 - Menjadi referensi terkait manajemen Pengelolaan informasi publik pada era digital
 - sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang

b. Praktis

Dengan diadakannya penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta mengenai pengelolaan aplikasi DatakuDIY.

D. Studi Terdahulu

Tabel 1. 1 studi terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Suryani et al., 2021)	Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dan produktivitas dari PPID Pemda DIY sebagai pejabat pengelola informasi publik. Penelitian ini mengemukakan bahwasanya masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi terkait, SDM, komunikasi dan tingkat kualitas kinerja,
2.	(Ardina & Saharudin, 2021)	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul	Peneliti pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di kabupaten Bantul. Peneliti melakukan penelitian terhadap 10 badan publik yang ada pada kabupaten Bantul dan

			berkeimpulan bahwa kabupaten bantul menyediakan sarana yang memadahi untuk masyarakat dalam mengakses informasi publik dengan mudah
3.	(Trijayanto et al., 2019)	Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Penelitian ini membahas tentang peran dan fungsi yang dilakukan oleh PPID Pemkot Yogyakarta dalam mengelola keterbukaan infotmasi Publik. Penilitian ini berfokus terhadap apa saja yang dilakukan oleh PPID Pemkot Yogyakarta dalam mengelola Informasi Publik. Penelitian ini juga melihat dari sudut pandang pelayananinforasi secara daring.
4.	(Cahya & Wibawa, 2019)	Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan uyag Baik	Penelitian ini membahas tentang peranan penting keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan tercipta goof governance dalam limgkungan pemerintah. Peneliti mengemukakan bahwa keterbukaaan informasi penting untuk terciptanya good governance pada lingkungan pemerintah.
5.	Alya Septiana Putri (2019)	Implementasi Cyber Public Relations Humas PEMDA DIY Dalam	Penerapan cyber public relations Humas Pemda DIY dalam memberikan informasi

		Memberikan Informasi Kepada Publik	publik, yaitu Pelayanan Transparansi, Kekayaan Informasi Melalui Media Online, Pengelolaan Media Sosial, Pengelolaan Interactive Newsroom (Ruang Berita Interaktif). Humas Pemda DIY menggunakan website dan media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter untuk memberikan informasi kepada publik.
6.	(Safaria et al., 2018)	Manajemen Inovasi Open Data Dalam Layanan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Bandung	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan inovasi layanan informasi publik, dengan fokus pembahasan kepada manajemen open data yang dikelola oleh pemerintah kota bandung. Penelitian ini secara singkat menjelaskan tentang efektifitas terhadap manajemen informasi dengan menggunakan teori model three steps oleh lewin dengan fokus pada pelayanan informasi,
7	(Indah et al., 2018)	Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya	Pada penelitian ini, penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Penulis membahas implementasi keterbukaan informasi publik

			dengan pendekatan beberapa faktor dan bekesimpulan bahwa implementasi berjalan dengan baik meskipun ada kekurangan yang terdapat selama kebijakan implementasi tersebut.
8	(Suryani et al., 2017)	Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik Negara di DIY memiliki kewajiban untuk mematuhi UU KIP dengan menyediakan, mengumumkan, dan melayani informasi. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap pelaksanaan UU KIP pada Badan Publik Negara di DIY terhadap ketiga hal di atas melalui 3 (tiga) tahap penilaian yaitu Self Assessment Questionare (SAQ), Peninjauan Website, dan Kunjungan ke Badan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Badan Publik Negara dalam mematuhi UU KIP masih rendah sehingga upaya mendorong budaya keterbukaan informasi pada Badan Publik perlu ditingkatkan.
9	Boby Toding (2017)	Hubungan Tugas Kehumasan	Dalam pelaksanaan Tugas kehumasan sudah sangat baik yaitu memberikan informasi,

		Dengan Impelementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Biro Humas Dan Protokol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	mengelola informasi , menyatukan persepsi dan lain-lain, dan juga pelaksanaan KIP di biro humas juga telah berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini juga penulis melihat tugas kehumasan dan keterbukaan informasi publik masih ada kekurangan seperti pemberian informasi pendidikan dan pengetahuan alam yang masih kurang terlebih pada media yang di gunakan dalam pemberian informasi seperti koran atau pun website. Dan juga yang masih terdapat kekurangan yaitu partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan dan juga dalam memberikan kritik dan saran karna pelaksanaan KIP juga dapat berjalan dengan baik jika masyarakatnya diikutsertakan dalam pelaksanaannya.
10.	(Harimurti, Djunaedi, & Kumorotomo, 2015)	Model Manajemen Informasi Untuk Mewujudkan Konsep Connected Government Di Pemda DIY	Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menemukan rumusan tentang manajemen informasi untuk mewujudkan konsep connected government di Pemda DIY. Peniliti pada jurnal ini menemukan bahwa Pemda DIY belum menerapkan model

			manajemen informasi.
--	--	--	----------------------

Penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini lebih fokus pada manajemen transformasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh BAPPEDA DIY melalui aplikasi Dataku DIY. Selain itu yang membedakan penelitian ini adalah melihat dari sudut pandang transformasi manajemen pemerintah dalam keterbukaan informasi di era digital. Adanya perbedaan teori, topik pembahasan serta metode dari penelitian ini juga yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori Dasar

1) Keterbukaan Informasi Publik

a) Definisi Keterbukaan Informasi Publik

Pada era informasi dan teknologi, informasi publik menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Penyerbaran informasi dan kebutuhan informasi semakin meningkat. Menurut (Suhendar, 2008) informasi dapat berfungsi untuk menjadi pengawas utama dalam lembaga pemerintah atau badan publik. Oleh karena itu penting untuk pemerintah mengakomodasi kebutuhan tersebut. Dalam Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada pasal 1 menjelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dikelola oleh suatu badan publik yang berkaikatan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaran badan publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut (Febriananingsih, 2012) UU KIP memiliki banyak manfaat jika diimplementasikan pada instansi pemerintahan antara lain: dapat mengurangi tingkat korupsi, mencegah adanya kesalahan administrasi, adanya partisipasi masyarakat, dan mendapat tanggapan balik dari masyarakat pada tujuan serta asas keterbukaan informasi publik.

Menurut UU KIP pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan ketebukaan informasi publik dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam pemerintah provinsi DIY pengelolaan informasi publik diatur dalam Perda No. 4 tahun 2021 tentang keterbukaan informasi, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah DIY adalah PPID. PPID sendiri terbagi menjadi 2 yakni : PPID utama dan PPID pembantu. PPID utama dalam Perda tersebut dijabat oleh Kepala Dinas di Daerah dan PPID pembantu dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang menangani ketatausahaan pada perangkat daerah. Secara garis besar tugas PPID utama dan pembantu memiliki perbedaan yakni, PPID utama bertugas untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, anggaran pendapatan dan belanja serta dana keistimewaan DIY, sedangkan PPID pembantu memiliki tugas untuk membantu menyediakan informasi dan dokumen yang ada.

Menurut (Febriananingsih, 2012) dengan lahirnya UU KIP informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dapat diakses dengan mudah, sehingga pencarian informasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk mendapatkan informasi yang berkualitas, ada hal yang harus diperhatikan dalam mengelola informasi publik. Menurut (Suhendar, 2008) beberapa hal tersebut adalah :

1. Akurat, yang dimaksud dengan akurat adalah segala informasi yang disampaikan publik haruslah benar dan terbebas dari kesalahan. Informasi yang disampaikan ke publik juga haruslah lengkap, benar dan jaminan keamanan atas informasi yang diberikan
2. Tepat waktu, yang dimaksud dengan tepat waktu adalah informasi didistribusikan dengan waktu yang cepat, sehingga penerima manfaat dapat mengambil keputusan secara efisien dan efektif berdasarkan informasi yang cepat dan tepat.
3. Relevan, yang dimaksud dengan relevan adalah relevansi dari informasi yang dibagikan haruslah sesuai kebutuhan publik yang memonta informasi.
4. Ekonomis, yang dimaksud dengan ekonomis disini adalah bukan tentang biaya ada tetapi diartikan sebagai nilai efektivitas dari pemberian informasi tersebut.

Beberapa faktor tersebut perlu dipertimbangkan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam keterbukaan informasi publik dan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan roda kebijakan pengelolaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi tidak terelakan pada zaman digital seperti ini. Iklim demokrasi yang semakin berkembang di Indonesia membuat pemerintah harus dapat beradaptasi dengan cara mempersiapkan sistem keterbukaan informasi publik dengan baik. Menurut (Retnowati, 2008) pemerintah pusat maupun daerah mempersiapkan setidaknya 4 instrument untuk mempersiapkan sistem keterbukaan informasi publik dengan baik, antara lain : instrument keuangan, instrumen materil, instrument yuridis, dan instrumen personel. Instrument – instrumen tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Keterbukaan informasi publik harus dilakukan oleh semua elemen pemerintah, tidak terkecuali pada pemerintah daerah. Salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi publik dalam pemerintah daerah menurut adalah (Faisal, 2021) kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan undang – undang yang dibuat oleh pemerintah pusat secara rinci dan baik.

2) E - Government

a) Definisi *E – Government*

Menurut *worldbank* (2021) *e – Government* di definisikan sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memiliki kemampuan untuk memudahkan hubungan antara masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah. singkatnya *e – Government* dapat dikatakan sebagai penggunaan teknologi dan Sedangkan menurut *United Development programme* mngatakan secara singkat bahwa E-government merupakan penggunaan teknolo dan informasi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut (Habibi, 2018) dalam jurnalnya *e - government* memiliki beberapa konsep kunci yakni :

1. Penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi oleh pemerintahan
2. Penyediaan layanan informasi berbasis *website*
3. Kemudahan akses antara pemerintahan, masyarakat, dan dunia bisnis
4. Relasi *E – Government* yang anatar lain pemerinyah dengan pemerintah, pemerintah dengan dunia bisnis), dan pemerintah dengan warganya

Dalam buku (Indrayani, 2020) *E – Government* diperlukan dalam proses integrasi informasi dan jenis layanan pemerintah sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa *e – Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

publik oleh pemerintah. Dalam instruksi presiden No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan strategis nasional pengembangan *E – Government* menjelaskan bahwa pengembangan *E – Government* adalah suatu usaha untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis pada elektronik, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.

Menurut (Indrajit, 2006) dalam bukunya menyebutkan bahwa ada 4 prinsip utama *E – Government* yakni :

1. Berfokus pada perbaikan layanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah harus menimbang layanan apa saja yang menjadi prioritas karena dengan banyaknya layanan pemerintah pada masyarakat maka akan sulit untuk fokus dalam pembenahan.
2. Membangun lingkungan yang kompetitif
Pemerintah dituntut untuk dapat membuat lingkungan kompetisi yang adil, tidak memihak, kondusif dan obyektif untuk mewujudkan tercapainya *E – Government*.
3. Memberikan penghargaan pada inovasi
Pemerintah dituntut untuk menyediakan bonus, hadiah, maupun penghargaan bagi yang sukses dalam implementasi *E – Government* pada tempat bekerja yang bersangkutan. Hal ini dapat memicu motivasi untuk terus berbenah dalam proses implementasi.

4. Penekanan pada capaian efisiensi

Memberikan layanan dengan teknologi tidak selamanya akan menjadi pendamping layana konvensional, oleh karena itu suatu saat nanti ketika masyarakat sudah terbiasa maka layanan konvensional kan dihapus untuk mencapai tingkat efisiensi. Efisiensi dinilai dengan besarnya manfaat yang diperoleh pemerintah dalam proses implementasi.

E- Government memudahkan beberapa aspek yang terlibat dengan pemerintah dalam bentuk hubungan ataupun relasi. Menurut (Damanik, 2017) implementasi *E- Government* membentuk beberapa hubungan antara lain : *Government to citizen* yakni hubungan pemerintah dengan masyarakat untuk memenuhi pelayanan terhadap masyarakat, *Government to Businis* yakni hubungan pemerintah dengan pelaku bisnis untuk membuka informasi dan pelayanan terhadap pelaku binis, *Government to Government overnment* yakni hubungan pemerintah dengan pemerintah untuk memudahkan kordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah, dan *Government to Employe* yakni hubungan pemerintah dengan pegawainya untuk mensejahterakan masyarakat.

3) Definisi Tranformasi Manajemen Pemerintahan

a) Definisi Transformasi Manajemen Pemerintahan

Dengan berkembangnya teknologi secara cepat pemerintah perlu melakukan adaptasi untuk mengimbangi perkembangan tersebut. Salah satu bentuk pemerinntah yang adaptif adalah dengan melakukan transformasi manajemen secara berkala sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut (Mutiarin, 2014) birokrasi dianggap perlu untuk melakukann *rethinking the way of life*, hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, berkualitas, serta tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi. Maka dari itu diperlukan transformasi manajemen dalam pemerintahan itu sendiri. Menurut Transformasi manajemen pemerintah sendiri menurut (Widanarto, 2019) adalah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengadkan perubahan dalam bidang struktural yang berhubungan dengan kelembagaan maupun bidang produsural yang berikatan dengan perubahan mekanisme yang ada dalam pemerintah.

Menurut (Mutiarin, 2014) birokrasi sedang menghadapi persaingan global, dengan begitu diharapkan birokrasi dapat melakukan reformasi dalam hal peningkatan kualitas layanan publik, penghematan biaya dan peningkatan sumber daya manusia. Untuk dapat melaukan reformasi birokrasi tersebut, maka diperlukan

transformasi manajemen. Menurut (Redjo, 2009) pemerintah daerah dituntut untuk dapat beradaptasi secara cepat guna memenuhi keinginan masyarakat yang meningin cepat dan tepat serta untuk meingkatkan kinerja pemerintah dalam bidang pembangunan dan pelayanan.

Menjalankan tranformasi tersebut tentu diperlukan beberapa tahapan untuk bertransformasi. Berdasarkan teori manajemen perubahan dari Kurt Lewin yang dikutip dari (Winardi, 2005) mengatakan bahwa dalam teori tersebut ada 3 fase dari manajemen yakni pencairan (*unfreezing*), mengubah (*change*), Pembekuan kembali (*refreezing*). Untuk membahas proses trnasformasi manajemen informasi publik maka Pugh memodifikasi teori tersebut untuk disesuaikan dengan konteks transformasi manajemen dalam hal pelayanan informasi publik (Safaria et al., 2018). yang kemudian dimodifikasi oleh Pugh, yakni :

1. Fase 1: Pencairan (*unfreezing*)

Fase pertama ini merupakan tahapan untuk mempersiapkan perubahan, menciptakan perubahan dan mengecilkan tantangan terhadap perubahan yang terjadi. Dalam tahap ini biasa disebut juga sebagai tahap introduksi ataupun sebagai tahapan pengenalan terhadap program baru dalam pelayanan informasi publik.

2. Fase 2 : Mengubah (*change*)

Fase perubahan merupakan fase implementasi perubahan atau inovasi yang sudah direncanakan. Dalam fase ini dibagi menjadi 4 indikasi yakni : penetapan kebijakan, penyediaan dan penunjukan SDM, penyediaan sarana dan prasarana dan penyediaan anggaran.

3. Fase 3 : Pembekuan Kembali (*refreezing*)

Fase pembekuan kembali merupakan tahapan terakhir dari proses perubahan. Dalam fase pembekuan ini ada 3 kunci utama memelihara momentum perubahan yakni dengan memperkuat hasil, mengevaluasi hasil, dan membuat modifikasi yang konstruktif. Jika dilihat dari konteks manajemen perubahan dalam manajemen pemerintahan pelayanan informasi publik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam fase ini, yakni : perubahan struktur, perubahan sikap, koleksi data, diseminasi informasi, dan pelibatan pengguna.

Teori tersebut dapat menjadi acuan dalam melihat dan menganalisis fase transformasi manajemen dalam tubuh pemerintah.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan karakteristik permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Bertujuan untuk membatasi suatu pengertian yang akan memudahkan dalam

melakukan penelitian di lapangan. Banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :

1) Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada pasal 1 menjelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dikelola oleh suatu badan publik yang berkaikatan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaran badan publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2) *E – Government*

Menurut *worldbank* (2021) *e – Government* di definisikan sebagai peggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memiliki kemampuan untuk memudahkan hubungan antara masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah. Sedangkan menurut (Indrayani, 2020) *e – Government* diperlukan dalam proses integrasi informasi dan jenis layanan pemerintah sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *E-government* merupakan penggunaan teknologi informs komunikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik

3) Transformasi Manajemen Pemerintahan

Menurut (Widanarto, 2019) transformasi manajemen pemerintahan merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengadakan

perubahan dalam bidang struktural yang berhubungan dengan kelembagaan maupun bidang prosedural yang berkaitan dengan perubahan mekanisme yang ada dalam pemerintah.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini akan menjelaskan dalam bentuk indikator dengan menggunakan teori perubahan manajemen untuk melihat proses transformasi manajemen yang terjadi dengan hadirnya aplikasi *Dataku DIY* oleh BAPPEDA. :

Tabel 1. 2 definisi operasional

Tujuan	Parameter	Indikator
Mengetahui proses transformasi manajemen keterbukaan informasi publik dengan hadirnya aplikasi <i>Dataku DIY</i> .	Fase 1: Pencairan <i>(unfreezing)</i>	a. Penyiapan aplikasi <i>Dataku DIY</i> b. Pengenalan aplikasi <i>Dataku DIY</i>
	Fase 2: Mengubah <i>(change)</i>	a. Penggunaan aplikasi <i>Dataku DIY</i> bagi BAPPEDA dan OPD DIY b. Pemanfaatan aplikasi <i>Dataku DIY</i> bagi OPD dan masyarakat
	Fase 3: Pembekuan	a. Perubahan sikap (<i>sharing, learning, collaborating</i>)

	kembali <i>(refreezing)</i>	<p>pengelola Dataku DIY</p> <p>b. Kumpulan data</p> <p>c. Diseeminasi Informasi kepada masyarakat</p> <p>d. Pelibatan pengguna</p>
--	--------------------------------	--

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Nugrahani, 2014) penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang menggambarkan situasi yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data. Alasan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah karena sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti yakni Transformasi Manajemen Pemerintah Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Digital. Studi Kasus : Aplikasi Dataku DIY Pemprov Yogyakarta. Dengan menggunakan metode penelitian ini maka peneliti berusaha untuk menganalisis berbagai macam data sesuai dengan bentuk aslinya.

2) Data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer menurut (Nugrahani, 2014) merupakan data utama yang diperoleh secara langsung, yang diperoleh dari informan atau narasumber. Dapat dikatakan bahwa data primer ini didapatkan dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan. Data primer sebagai berikut:

Tabel 1. 3 instansi

NO	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Proses transformasi manajemen keterbukaan informasi publik dengan hadirnya aplikasi Dataku DIY di Bappeda DIY	Bappeda DIY	Wawancara
2	Perubahan sikap organisasi (<i>sharing, learning, collaborating</i>) dengan hadirnya aplikasi Dataku	<ul style="list-style-type: none">• Bappeda DIY	Wawancara

	DIY		
3	Proses pengelolaan informasi publik dengan hadirnya aplikasi Dataku DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda DIY 	Wawancara
4	Pemanfaatan aplikasi Dataku DIY oleh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat 	Wawancara

b) Data Sekunder

Menurut (Nugrahani, 2014) data sekunder merupakan data tambahan yang diambil tidak secara langsung, melainkan diperoleh dari dari sumber yang sudah diolah oleh orang lain seperti, dokumen, dokumen, statistik, dan buku. Sehingga dapat dikatakan bahwa data sekunder ini sebagai pendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dokumen seperti : Data partisipasi OPD dalam penggunaan dan pemanfaatan keterbukaan informasi publik di aplikasi Dataku DIY, data partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan keterbukaan informasi publik di aplikasi Dataku DIY, undang – undang No. 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik, Perda DIY tentang pengelolaan informasi

dan keterbukaan informasi serta buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan.

3) Unit Analisis

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, maka unit analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, PPID pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, serta Komisi Informasi Daerah DIY.

4) Lingkup Penelitian

Untuk dapat menjawab rumusan penelitian ini maka, peneliti membatasi ruang lingkup yang diteliti, diantaranya : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, dan PPID pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.

5) Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Nugrahani, 2014) teknik pengumpulan data didasari oleh berbagai macam jenis data dan penggalian sumber data maka peneliti perlu untuk menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan waktu, kondisi, biaya dan pertimbangan lainnya guna mendapatkan penelitian yang efektif. Pada Penelitian ini, peneliti akan mencari data tentang proses transformasi manajemen keterbukaan informasi dengan adanya aplikasi Dataku DIY. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka memiliki kaitan erat dengan kajian pustaka dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Kajian pustaka sendiri menurut (Nugrahani, 2014) bahan bacaan yang tertulis berupa jurnal maupun buku yang membahas topik penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti dalam studi pustaka membaca dari buku, jurnal dan literatur yang berhubungan dengan transformasi manajemen dan pengelolaan informasi publik dalam era digital.

b. Wawancara

Menurut (Nugrahani, 2014) wawancara merupakan teknik pencarian informasi yang bersifat interaktif melalui dialog dengan dua belah pihak atau lebih dengan tujuan tertentu. Teknik wawancara dipilih untuk dapat memperdalam topik yang akan dilakukan peneliti. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan dengan ciri – ciri yang sudah ditentukan. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian:

Tabel 1. 4 narasumber

Informan	Jabatan	Data yang akan didapatkan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	Kepala BAPPEDA DIY (selaku atasan PPID pembantu BAPPEDA DIY)	Proses transformasi manajemen keterbukaan informasi publik dengan hadirnya aplikasi <i>Dataku DIY</i> di Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	PPID Pembantu (Sekretaris Bappeda DIY)	Perubahan sikap organisasi (<i>sharing</i> ,

		<i>learning, collaborating)</i> dengan hadirnya aplikasi <i>Dataku DIY</i> di Bappeda DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY • UPT Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, 	Pemanfaatan aplikasi <i>Dataku DIY</i> bagi Organisasi Perangkat daerah DIY
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	<ul style="list-style-type: none"> • UPT Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah, 	Proses Pengelolaan informasi publik dengan hadirnya aplikasi <i>Dataku DIY</i>
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • 2 orang Pengguna aplikasi <i>Dataku DIY</i> 	Pemanfaatan aplikasi <i>Dataku DIY</i> oleh masyarakat

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi menurut (Nugrahani, 2014) merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan berbagai dokumen yang ada sebagai data skunder untuk melengkapi data primer . Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data atau dokemuen yang berkaitan dengan proses transformasi manajemen yang dilakukan BAPEDDA DIY dengan adanya aplikasi dataku DIY, serta undang – undang maupun peraturan daerah yang dapat menjadi landasan lahirnya proses transformasi manajemen tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan

menggunakan dokumen seperti : Data partisipasi OPD dalam penggunaan dan pemanfaatan keterbukaan informasi publik di aplikasi Dataku DIY, data partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan keterbukaan informasi publik di aplikasi Dataku DIY, undang – undang No. 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik, Perda DIY tentang pengelolaan informasi dan keterbukaan informasi dan dokumen yang berkaitan.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut (Nugrahani, 2014) merupakan pengaturan sistematis bahan wawancara dan observasi dalam menafsirkan data yang diperoleh. Dengan kata analisis data disini merupakan pengolahan dari data- data yang didapatkan oleh peneliti baik dari sumber data primer maupun sumber data skunder. Dari analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan terhadap objek penelitian, sehingga bermanfaat dalam penguatan data dalam penelitian yang sedang dilakukan.

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Menurut (Raco, 2010) pengumpulan data merupakan kumpulan data penilitan yang berupa dokumen, gambar, cerita, foto. Data penilitan dikumpulkan ketika tujuan penilitian sudah jelas dan narasumber atau informan sudah menyetujui untuk membagikan informasi dan data terkait. Maka, dalam tahap ini penulis akan mengumpulkan beberapa data premier dan sekunder terkait dengan penelitian.

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data menurut (Nugrahani, 2014) merupakan proses analisis data untuk penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk menggolongkan, memperjelas, mengarahkan, dan membuat fokus dengan melakukan proses seleksi data dengan baik untuk mempermudah sajian data yang mudah dipahami. Berdasarkan teori diatas maka, dalam tahap ini peneulis melakukan seleksi data untuk memilah data mana yang bisa digunakan ataupun relevan terhadap penelitian tersebut.

3. Mengolah Data

Dalam tahap ini penulis akan melakukan pengolahan data setelah data terpilah dengan baik. Pengolahan data tersebut bertujuan untuk mengolah data yang sudah direduksi. Data – data yang sudah diolah tersebut akan digunakan untuk penyajian data dalam penelitian ini.

4. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data menurut (Nugrahani, 2014) merupakan rakitan informasi yang disusun dalam bentuk narasi dengan deskripsi yang lengkap berdasarkan inti dari temuan yang ada dalam proses reduksi data dengan penyajian bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Dalam tahap ini penulis akan menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti : gambar, grafik, bagan, table, dan ilustrasi.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Menurut (Nugrahani, 2014) Penarikan kesimpulan dapat dikatakan sebagai kegiatan tafsiran dari hasil analisis dan interpretasi data. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan : judul penelitian, tujuan peneilitian, rumusan masalah, data yang ada dalam penilitian, teori yang relevan dan temuan dari hasil analisis data dalam penilitian.

Bagan 1. 1

